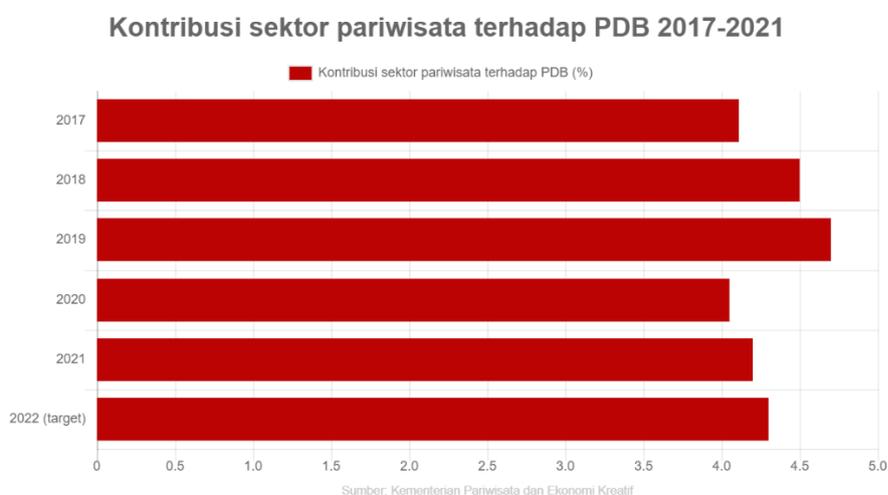


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

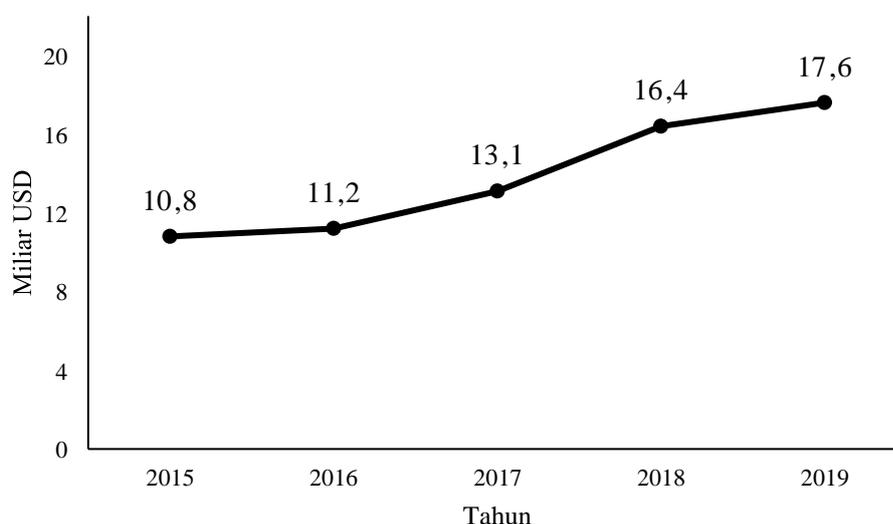
Pariwisata memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan PDB Indonesia cenderung mengalami naik turun selama lima tahun terakhir (Gambar 1.1). Turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) karena pandemi Covid-19 praktis membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto dan devisa negara merosot. Pada 2020 misalnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 4,05%, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 4,7%. (Kemenparekraf, 2021).



Gambar 1. 1
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB 2017-2021
(Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin melalui penerimaan devisa negara. Dalam lima tahun sebelum pandemi 2020, penerimaan devisa dari sektor pariwisata konsisten mengalami peningkatan, dari USD 10,8 miliar pada tahun 2015, menjadi USD 17,6 miliar pada tahun 2019 (Gambar 1.2). Menurut Bank Indonesia (2018), pariwisata memiliki karakteristik

quick yielding yang dapat menghasilkan devisa lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan untuk devisa sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkirakan akan sebesar US\$0,36 miliar saja pada tahun 2021. Angka itu jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang senilai US\$3,3 miliar. Sedangkan pada tahun 2019, devisa sektor pariwisata mampu mencapai US\$17,6 miliar.



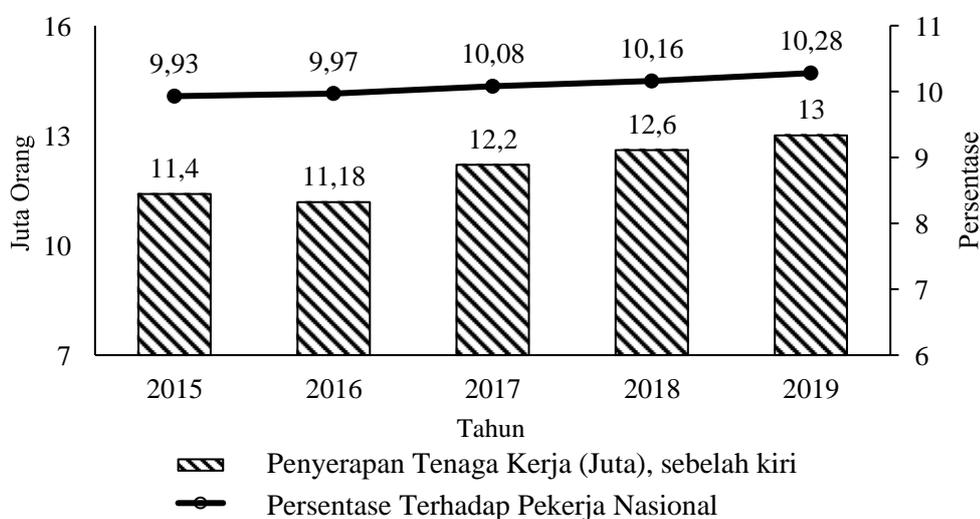
Gambar 1. 2
Penerimaan devisa sektor pariwisata 2015-2019
(Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pergerakan wisatawan nusantara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12% bila dibandingkan tahun 2020. Tidak hanya itu, terjadi peningkatan devisa pariwisata sebesar 4% dibandingkan tahun 2020 yakni US\$ 0,32 miliar menjadi US\$ 0,36 miliar. Kontribusi PDB Pariwisata diperkirakan meningkat 37,4% dari persentase pada tahun 2022 sehingga mencapai angka 4.2% pada tahun 2021 lalu. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif diperkirakan meningkat hingga mencapai US\$ 20,58 miliar dan nilai tambah ekonomi kreatif pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan hingga Rp 1.273 triliun.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pergerakan wisatawan nusantara ini akan menjadi andalan dalam pemulihan sektor pariwisata nasional tahun 2022 dengan target 260 sampai 280 juta pergerakan. Diperkirakan, kontribusi

sektor pariwisata terhadap PDB Nasional 2022 akan mencapai 4,3%. Sedikit lebih tinggi dari perkiraan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 4,2%. Selain itu, lanjutnya, dari sisi nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan tahun 2022 dapat mencapai Rp 1.236 triliun. Untuk nilai ekspor produk kreatif ditargetkan mencapai US\$ 21,28 Miliar (<https://industri.kontan.co.id>).

Sementara itu, dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pariwisata juga memiliki peran penting. Data Kemenparekraf (2020) memperlihatkan adanya kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata, dari sebesar 11,4 juta orang (9,93%) pada tahun 2015, menjadi sebesar 13 juta orang (10,28%) pada tahun 2019 (Gambar 1.3). Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,6 juta dalam 5 tahun sebelum pandemi covid-19 awal tahun 2020 silam.



Gambar 1. 3
Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata 2015-2019
 (Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020)

Berdasarkan peran dan kontribusinya tersebut, keberlanjutan sektor pariwisata memiliki urgensi bagi pembangunan ekonomi nasional ke depan, baik dalam konteks mendorong pertumbuhan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun perkembangan sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir terlihat cukup baik, kinerja sektor pariwisata Indonesia saat ini masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Dari sisi

penerimaan devisa di sektor pariwisata, Indonesia hanya menempati posisi ke-27 dunia pada tahun 2019. Peringkat ini masih jauh jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Thailand yang menduduki posisi ke-4 dengan pendapatan devisa mencapai USD 66,2 miliar pada tahun 2019. Begitu juga dengan Malaysia yang berada di posisi ke-19 sebesar USD 21,9 miliar dan Singapura di posisi ke-21 sebesar USD 21 miliar. Terlebih jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, yang menduduki posisi pertama dengan penerimaan devisa sebesar USD 264,6 miliar, kemudian disusul Spanyol sebesar USD 81,4 miliar, dan Perancis di posisi ketiga sebesar USD 72,9 miliar (Nation Master 2020). Selain itu, berdasarkan nilai *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI), Indonesia masih berada pada peringkat ke-40 di dunia pada tahun 2019 dengan nilai indeks sebesar 4,3. Peringkat ini masih jauh di bawah Singapura di peringkat 17, Malaysia di peringkat 29, dan Thailand di peringkat 31 (World Economic Forum 2019).

Dampak dari pertumbuhan pada tahun 2021 itu tentunya akan memperluas jumlah lapangan kerja pada sektor pariwisata ekonomi kreatif. Kemenparekraf menargetkan tahun 2022 tercipta 1,1 juta lapangan kerja hingga 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 yang berkualitas di sektor pariwisata. Sementara di ekonomi kreatif akan tumbuh lebih dari 600.000-700.000 lapangan kerja yang ditopang oleh sektor unggulan yakni kuliner, kriya, dan fesyen. Pandemi ini di sisi lain memiliki sisi positif karena justru mempercepat perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari *Quantity Tourism* menjadi *Quality and Sustainable Tourism* (<https://industri.kontan.co.id>).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa daya saing pariwisata Indonesia di skala internasional perlu ditingkatkan dengan mendayagunakan potensi yang ada. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan bentang alam luas dan masyarakat heterogen yang dapat menjadi daya tarik (*attraction*) untuk berbagai destinasi pariwisata. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 38 Provinsi, 300 suku bangsa, 742 bahasa, 13 situs warisan budaya, 51 taman nasional dan keanekaragaman hayati terbesar nomor 3 di dunia (LPEM FEB UI, 2022). Maka, potensi tersebut seharusnya dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan nilai jual sektor pariwisata Indonesia.

Fariz Fardani Nurbaihaqi, 2023

STRATEGI PEMBIAYAAN PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan dan pembangunan pariwisata pada umumnya telah diwujudkan dalam perkembangan kebijakan beberapa dekade terakhir. Peraturan Pemerintah tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025 menjabarkan peta perwilayahan pembangunan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (PRI, 2011). Hal ini merupakan salah satu manifestasi dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang telah menggariskan bahwa kepariwisataan berkelanjutan dapat dikembangkan demi mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya adalah *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang memiliki dasar pemikiran bahwa pertumbuhan harus berkualitas dengan prinsip *sustainable growth with equity*, yang diterjemahkan dalam *four-track strategy* yaitu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), pengurangan kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan pekerjaan (*pro jobs*), dan pelestarian lingkungan hidup (*pro environment*). Selain itu, MP3EI juga menggariskan bahwa pembangunan ekonomi adalah sebuah estafet, sehingga harus ada kesinambungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antar periode pemerintahan.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya untuk dikembangkan dan dipromosikan pada skala nasional maupun internasional dengan didukung pembangunan destinasi pariwisata. Hal ini dapat dipahami mengingat Kabupaten Tanggamus memiliki potensi wisata yang besar dan karakteristik yang unik, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, sehingga berpeluang menjadi *multi-destination tourism*. Dalam hal potensi fisik, kondisi alam (*landscape*) di Kabupaten Tanggamus memiliki *natural beauty* yang masih terjaga kelestariannya dengan jenis wisata yang sangat beragam, mulai dari pantai, gunung, air terjun, goa, dan hutan.

Sementara itu, dari sisi potensi nonfisik, Kabupaten Tanggamus didukung oleh keramah tamahan (*hospitality*) masyarakat lokal. Masyarakatnya berasal dari beragam suku seperti suku Sunda, Jawa, Bali, Bugis, dan Lampung yang dikenal

Fariz Fardani Nurbaihaqi, 2023

STRATEGI PEMBIAYAAN PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sangat ramah dan minim perselisihan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Walpole dan Goodwin (2001), dalam penelitiannya menemukan adanya sikap positif dari masyarakat lokal atas kedatangan wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Lebih lanjut, terdapat keberagaman (*diversity*) dalam kekayaan budaya lokal (*culture*), diantaranya tradisi pangan balak, tarian takhi pikhing khua belas, dan beberapa tradisi lainnya yang turut menambah daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Dalam mengembangkan Kabupaten Tanggamus sebagai destinasi pariwisata di Provinsi Lampung, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan dan arah pembangunan pariwisata di Kabupaten tersebut. Pertama, dilakukannya pengaturan dan pengendalian tata ruang. Kedua, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan akses dan konektivitas di terminal, juga konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dermaga, dan pelabuhan-pelabuhan. Ketiga, arah kebijakan terkait fasilitas di lokasi wisata, dimana perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet. Keempat, aspek sumber daya manusia (SDM), yaitu perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, perlu peningkatan SDM dalam hal budaya kerja, budaya melayani, dan budaya kebersihan. Kelima, terkait pemasaran produk lokal. Dan keenam, terkait promosi besar-besaran secara terintegrasi (Kementerian PUPR dan Pemda Kabupaten Tanggamus, 2022).

Di tengah perkembangannya tersebut, Kabupaten Tanggamus dianggap belum memberikan dampak optimal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Hal ini diindikasikan dari gambaran kesejahteraan masyarakat yang masih belum cukup baik. Data BPS Kabupaten Tanggamus (2022) memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih relatif tinggi, yakni sebesar 11,7% walaupun lebih rendah dari Provinsi Lampung sebesar 12,3%. Sejalan dengan ini, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus juga masih relatif rendah, yakni sebesar 66,65 pada tahun 2021 dibandingkan oleh IPM Provinsi Lampung sebesar 69,90. Meskipun PDRB Kabupaten Tanggamus secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya, kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masih

rendah. Hal ini tercermin dari garis kemiskinan di Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 397,984 (BPS Kabupaten Tanggamus, 2022).

Fakta di atas menyiratkan bahwa pembangunan pariwisata di Kabupaten Tanggamus belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Padahal menurut Tung dan Cuong (2020), pariwisata berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah. Beberapa studi menyebutkan agar pariwisata dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diperlukan aspek keterpaduan (Kementerian PUPR, 2018), inklusif (Biddulph & Scheyvens, 2018) dan keberlanjutan (Ardialisa, 2012). Pariwisata terpadu merupakan konsep yang dikembangkan dengan memperhatikan keterpaduan dan integrasi spasial dan nonspasial antar destinasi atau objek wisata, baik di dalam Kawasan maupun di luar Kawasan dalam lingkup nasional (Kementerian PUPR, 2018). Pariwisata yang inklusif merupakan konsep pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan unsur partisipasi seluruh masyarakat secara luas dalam kegiatan pariwisata, melalui perluasan dan kemudahan akses. Biddulph dan Scheyvens (2018) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata yang inklusif akan memberikan manfaat kepada golongan masyarakat yang selama ini termarjinalisasikan dalam sektor pariwisata berkelanjutan, di antaranya termasuk masyarakat lokal dan pelaku UMKM pariwisata. Sementara itu Ardialisa (2012) mengungkapkan pariwisata yang berkelanjutan merupakan konsep pariwisata yang memperhatikan unsur pemeliharaan dan peningkatan kualitas daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam melalui upaya-upaya untuk memperhatikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep pariwisata berkelanjutan harus melibatkan unsur masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan keuntungan (*profit*).

Dalam konteks aspek-aspek di atas, sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Dalam aspek keterpaduan, permasalahan dan tantangan pariwisata berkelanjutan diindikasikan oleh beberapa hal berikut: (a) ketidakterpaduan kerjasama *stakeholders* dan kebijakan, hal ini berkaitan juga dengan harmonisasi kebijakan dan aturan perizinan antara pusat dan daerah (Widaningrum dan Damanik, 2016); (b) ketidakterpaduan antara nilai produk (*product value*) yang ditawarkan dengan

Fariz Fardani Nurbaihaqi, 2023

STRATEGI PEMBIAYAAN PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kondisi sarana pendukungnya (Komalasari dan Ganiarto, 2019); (c) ketidak-terpaduan dalam hal pengelolaan produk pariwisata, terutama pada pilar-pilar *attractions, accessibility, amenities, dan ancillary* sehingga potensi pariwisata tidak berkembang secara optimal (Sugiarto dan Mahagangga, 2020); (d) ketidak-terpaduan dalam arah pengembangan pada aspek kesejahteraan umum. Benefit ekonomi dan bisnis yang dihasilkan pada satu sisi, ternyata melahirkan implikasi negatif pada aspek ketenagakerjaan lokal, sumberdaya lahan dan lingkungan (Remmer, 2017); (e) ketidakterpaduan dalam konteks *product value creation* untuk merespon adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas destinasi antara wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (Wiarti *et al.*, 2019); (f) ketidakterpaduan dalam hal menciptakan kesempatan partisipasi dan akses bagi semua pihak, dimana kesempatan untuk berpartisipasi pada aktivitas pariwisata masih cenderung didominasi oleh para pihak dengan akses yang kuat pada permodalan (Kodir *et al.*, 2020); dan (g) ketidakterpaduan dalam hal program dan partisipasi untuk semua *stakeholders* untuk mengatasi masalah pengelolaan (Benu, 2020).

Aspek berkelanjutan juga menjadi tantangan besar bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Hal ini terwujud dalam *trade-off* antara berkelanjutan (*sustainability*) terkait rencana pemerintah menempatkan Kabupaten Tanggamus sebagai destinasi wisata di Provinsi Lampung. Berkelanjutan dan peningkatan kualitas pariwisata di Kabupaten Tanggamus menghadapi dilema antara mengedepankan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dengan pembatasan akses untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Di satu sisi, pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus diharapkan tidak menyingkirkan masyarakat lokal, namun harus dapat mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat, sehingga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*sustainable growth with equity*) harus menghasilkan kesempatan dan akses yang lebih luas bagi pemberdayaan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi serta mendapatkan manfaat dari pertumbuhan tersebut secara berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan juga memerlukan pengembangan infrastruktur, investasi, industri pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM masyarakat sekitar (Azzat, 2018).

Fariz Fardani Nurbaihaqi, 2023

STRATEGI PEMBIAYAAN PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1. 1
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Tanggamus

No.	Tahun	Target Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Manacanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara	Total Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Per Tahun
1.	2016	250.000	1.164	385.645	386.808	-
2.	2017	300.000	2.211	435.581	437.792	12%
3.	2018	350.000	3.535	455.068	458.603	5%
4.	2019	500.000	2.105	597.786	599.891	24%
5.	2020	600.000	0	100.965	100.965	-
6.	2021	500.000	0	121.997	121.997	20%
7.	2022	500.000	20	387.000	387.020	77%

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022)

Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun selanjutnya yang tercantum dalam Tabel 1.1, nyatanya memberikan masalah lingkungan yang mulai muncul, salah satunya terkait permasalahan limbah di Kabupaten Tanggamus, karena hotel, *home stay*, *restaurant* yang berada di pinggir pantai cenderung membuang limbahnya ke laut (Observasi peneliti, 2022). Hal ini tidak hanya merusak *natural beauty* yang menjadi daya tarik utama pariwisata, namun juga berdampak negatif bagi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar daerah wisata. Pembangunan yang saat ini terjadi juga berisiko menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan terancamnya habitat lumba-lumba di Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus. Keindahan dan kelestarian alam yang menjadi daya tarik pariwisata harus dijaga dengan upaya konservasi yang tepat agar manfaat pariwisata yang dirasakan dapat berkelanjutan (*sustainable*).

Dalam memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Tanggamus, tentunya harus diimbangi dengan kebijakan pembiayaan yang tepat baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Selama ini, pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai sektor pariwisata belum terlihat signifikan dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Demikian pula dengan keterlibatan swasta yang masih minim dalam berinvestasi di Kabupaten Tanggamus ini. Ruang fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat terbatas serta masih rendahnya partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan sektor pariwisata akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Tanggamus.

Desain pariwisata berkelanjutan harus menjadi kerangka kerja bagi upaya untuk memberikan dampak yang lebih optimal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kerangka kerja tersebut harus mencerminkan respon atas tantangan pariwisata berkelanjutan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk merumuskan arah dan desain berkelanjutan, serta strategi pembiayaan yang tepat, diperlukan dasar pemahaman yang utuh dan komprehensif atas karakteristik pariwisata di Kabupaten Tanggamus, khususnya terkait kondisi pelaku usaha pariwisata, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Sebagai gambaran awal, menurut Remmer (2017), 72% pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus berbentuk UMKM yang berbasis individu (*single ownership*).

Menurut Tambunan (2002), pelaku UMKM cenderung menghadapi permasalahan seperti kekurangan modal, kurangnya bahan baku, tidak tersedianya pasar, dan kurangnya SDM yang berkualitas sehingga berimplikasi pada pendapatan dan kinerja keuangan. Padahal, studi Mshenga *et al.* (2010) menemukan bahwa pendapatan UMKM berperan terhadap pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini mengindikasikan diperlukannya upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha pariwisata yang didominasi UMKM dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan pendapatan pelaku usaha pariwisata. Untuk itu, diperlukan pemahaman atas faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus.

Dengan demikian, untuk mendukung arah dan desain pariwisata berkelanjutan, diperlukan strategi pembiayaan yang dapat mendukung penguatan pada pelaku usaha pariwisata, terutama UMKM. Studi *Organisation for Economic Co-Operation and Development* atau OECD (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan yang efektif untuk para pelaku usaha di sektor pariwisata terutama UMKM dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, OECD (2017) juga menyebutkan bahwa akses ke pembiayaan sangat penting untuk mempromosikan kewirausahaan dan pengembangan UMKM serta membangun sektor pariwisata yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk itu, sebagaimana Ribarić dan Ribarić (2013), pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan (*financial assistance*) kepada sektor-sektor usaha potensial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, strategi pembiayaan yang tepat juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan relatif rendahnya pembiayaan sektor pariwisata (*under investment*) serta alokasinya yang belum seimbang atau menyeluruh. Namun, alokasi tersebut masih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan belum untuk pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh. Sementara itu, pembiayaan dari pemerintah daerah juga dinilai masih sangat terbatas. Anggaran pemerintah daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Tanggamus masih sangat terbatas, terutama pembiayaan yang ditujukan untuk mewujudkan

masyarakat yang sadar wisata melalui pelatihan dan edukasi (Sugiarto dan Mahagangga, 2020). Padahal, Kabupaten Tanggamus membutuhkan pembiayaan yang memadai, terutama untuk meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata dan mendorong pengembangan usaha-usaha masyarakat dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus tersebut.

Studi mengenai pembiayaan untuk pariwisata berkelanjutan di suatu wilayah telah dilakukan baik di lintas negara maupun di Indonesia. Beberapa studi yang dilakukan di lintas negara antara lain dilakukan oleh Roberts *et al.* (2016) yang mengkaji pembiayaan jangka panjang pariwisata berkelanjutan di objek wisata Tambopata National Reserve, Peru. Studi Plzakova (2017) mengevaluasi peranan keuangan publik pada tingkat daerah untuk sektor pariwisata di Republik Ceko. Sementara itu, Whitelaw *et al.* (2014) mengkaji pembiayaan untuk pariwisata yang berkelanjutan dalam konteks proteksi dan konservasi area wisata. Begitu juga studi Safakh (2005) yang mengkaji pengembangan *foreign direct investment* (FDI) untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Siprus bagian utara. Dalam konteks Indonesia, studi pembiayaan pada kawasan wisata dilakukan oleh Latuconsina *et al.* (2013) yang mengkaji strategi pembiayaan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kota Ambon. Begitu juga terdapat beberapa studi yang berfokus di Kabupaten Tanggamus, seperti Erb (2004); Marry dan Kristanto (2013); Sugiarto dan Mahagangga (2020); Kodir *et al.* (2020) dan Suasapha *et al.* (2020).

Studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada saat observasi awal pada tanggal 25-28 Februari 2022, didapatkan data sebagai berikut (Nurbaihaqi, 2022): 1) Modal pembiayaan usaha sektor pariwisata yang terdapat di Kabupaten Tanggamus mayoritas dari keuangan sendiri tanpa pinjaman bank dan seluruh pembiayaan yang berjalan di tempat wisata berasal dari masyarakat lokal, 2) Masyarakat di Kabupaten Tanggamus mayoritas berpenghasilan dari nelayan, berkebun, dan pariwisata, 3) Hambatan utama pariwisata di Kabupaten Tanggamus adalah keegoan masing-masing masyarakat untuk mendapatkan tamu, dan belum terjalin satu pemikiran untuk mengembangkan pariwisata secara inklusif, 4) Belum adanya kesadaran masyarakat lokal terhadap pariwisata karena kurangnya

sosialisasi dari pemerintah dan rendahnya pendidikan masyarakat lokal, 5) Terpuruknya pariwisata di Kabupaten Tanggamus bermula karena bencana tsunami yang terjadi pada Tanggal 22 Desember 2018 dan pandemi diawal 2020, namun masyarakat lokal dan pemerintah belum menemukan solusi yang terbaik untuk membangkitkan pariwisata Kabupaten Tanggamus menjadi kembali normal.

Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan studi yang secara khusus mengkaji terkait strategi pembiayaan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, terutama yang berbasis pada data-data empiris. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut. Berdasarkan uraian diatas, Kabupaten Tanggamus membutuhkan strategi pembiayaan yang tepat untuk merespon tantangan pariwisata berkelanjutan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pemetaan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus?
3. Bagaimana prioritas pembiayaan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus?
4. Bagaimana upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus?
5. Bagaimana strategi pembiayaan pelaku usaha pariwisata dan upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini hendak menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Tanggamus.
2. Memetakan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus.
3. Merumuskan prioritas pembiayaan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus.
4. Merumuskan upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus.
5. Merumuskan strategi pembiayaan pelaku usaha pariwisata dan upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan manfaat, baik dari segi akademis maupun manfaat praktis. Manfaat akademis, studi ini memberikan kontribusi akademis untuk mengisi *knowledge gap* melalui hasil temuannya berupa strategi pembiayaan pelaku usaha pariwisata untuk optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. Sehingga hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam mengupayakan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pemulihan sektor pariwisata. Sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk diadopsi dan diterapkan di kabupaten, kota, serta kawasan wisata lain di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, serta meningkatkan citra pariwisata Indonesia di kancah internasional.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terfokus pada:

1. Kabupaten Tanggamus yang berada di Provinsi Lampung.
2. Survei lapang yang diobservasi adalah pelaku usaha pariwisata mencakup UMKM yang berada di Kabupaten Tanggamus yang bergerak di bidang penyedia makan minum, biro perjalanan wisata, toko souvenir, usaha kerajinan, transportasi, pemandu wisata, salon dan spa, penginapan.
3. Pakar yang terlibat dalam AHP mencakup perwakilan dari pengambil kebijakan, perbankan, akademisi dan asosiasi di tingkat regional Kabupaten Tanggamus maupun nasional.